

## **EVALUASI DIRI DAN PERENCANAAN KERJA PENDIDIKAN BAGI PENINGKATAN MUTU SEKOLAH/MADRASAH**

Agus Salim Chamidi

IAINU Kebumen

[aschamidi@yahoo.co.id](mailto:aschamidi@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang evaluasi diri dan perencanaan kerja pendidikan bagi sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah/madrasah, dan hubungan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk menemukan hubungan antara evaluasi diri dan perencanaan kerja pendidikan bagi upaya-upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah. Pembahasan bersifat deskriptif-analitik untuk memahami keduanya dan hubungan keduanya. Kesimpulannya adalah bahwa (1) proses evaluasi diri di sekolah/madrasah mutlak penting diselenggarakan untuk mengetahui posisi profil mutu sekolah/madrasah, untuk menyusun rekomendasi dan membuat skala prioritas, (2) perencanaan kerja pendidikan di sekolah/madrasah akan berlangsung sukses apabila berbasiskan evaluasi diri yang jelas, dan (3) suksesnya proses evaluasi diri menjadi prasyarat suksesnya perencanaan kerja pendidikan, dan semakin baik penyelenggaraan EDS/M dan perencanaan kerja pendidikan maka semakin jelas upaya peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah/madrasah.

***Katakunci: evaluasi diri, perencanaan kerja pendidikan***

## **Abstracts**

This article explains about the significance of self-evaluation and workplans of education for an educational institution like school/madrasah, and relation of both. Its aim is for finding relation both self-evaluation and workplans of education for efforts on upgrading quality of school /madrasah. The explanation is analytical-descriptive to understand the both and their relation. The conclusion are those (1)process of self-evaluation in the school/madrasah is important absolutely to know its position of quality profile, for arranging recommendation and making scale of priority, (2)workplans of education in school/madrasah will be success if it is based on a clear self-evaluation, (3)the success of process of self-evaluation becomes prerequisite the success of workplans on education, and the better coordination the self-evaluation and the workplans of education the clearer efforts on upgrading quality of school /madrasah

***Keywords: self-evaluation, planning of education***

## **Pendahuluan**

Mengapa sejumlah lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren di beberapa tempat mengalami kemunduran bahkan kemudian gulung tikar? Lalu, langkah apa yang harus diperbuat untuk menghindari kemunduran dan kebangkrutan lembaga pendidikan? Kedua pertanyaan ini sering terdengar di sekitar kita. Kita pun tiba-tiba terhenyak harus menjawab dari mana.

Mengapa madrasah A itu sering berprestasi? Mengapa sekolah B itu anak-anaknya nakal-nakal? Mengapa pendidik di sekolah C terlihat semangat dan gembira, dan mengapa pendidik di madrasah D terlihat lesu? Banyak lagi pertanyaan muncul terdengar di sekitar kita. Kita pun kadang bingung untuk memulai menjawabnya.

Tentunya menjawab persoalan yang muncul itu tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Akan tetapi menjawab persoalan itu menjadi tanggungjawab kita sebagai pegiat kependidikan. Tulisan ini berusaha untuk membantu menyodorkan jawaban dengan membahas evaluasi diri dan perencanaan kerja pendidikan sebagai bagian dari proses manajemen pendidikan. Selain itu, tulisan ini juga mencoba membangun hubungan keduanya bagi upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah di masa mendatang.

### **Memahami Evaluasi Diri**

Manajemen pendidikan, termasuk di dalamnya manajemen pendidikan Islam sangat berkaitan dengan proses siklus dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dan evaluasi di dalam suatu lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan Islam, menurut Agus Salim Chamidi<sup>1</sup>, adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di dalam lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam berupa pembangunan sumberdaya manusia insan kamil, dengan mendasarkan pada nilai-nilai ke-Islaman yang bersumber pada sumber utama Al Qur'an dan Al Hadits, dengan memberdayakan segenap sumberdaya yang ada secara efektif, efisien, dan produktif, agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara sederhana proses manajemen pendidikan Islam terdiri dari siklus dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dan evaluasi. Selesai proses evaluasi dan diselenggarakan penilaian pun proses manajemen pendidikan terus berputar kembali untuk membuat perencanaan baru, pelaksanaan baru, pengorganisasian baru, dan pengawasan dan evaluasi baru, dan begitu seterusnya berkesinambungan.

Seperti sudah diketahui bahwa pemerintah Indonesia tengah serius meningkatkan mutu pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu

---

<sup>1</sup> Agus Salim Chamidi, *Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prospek dan Tantangan Dunia Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2015, hal.38-39. Lihat juga Agus Salim Chamidi, *Membedah Identitas Santri*, dalam *Jurnal An Nahdhah*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2017.

Pendidikan. Peraturan ini mengarahkan lembaga pendidikan untuk bersiap diri melakukan evaluasi diri dan bersiap diri mendapatkan monitoring oleh pemerintah daerah. Khusus evaluasi diri, di kalangan sekolah dikenal istilah evaluasi diri sekolah (EDS), dan di kalangan madrasah dikenal evaluasi diri madrasah (EDM).

EDS ini, menurut Hendarwan<sup>2</sup>, merupakan proses pemetaan mutu sekolah oleh pihak sekolah sendiri secara jujur dan transparan sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang dihadapi dalam penjaminan mutu pendidikan, yang selanjutnya dapat dirumuskan rekomendasi atau langkah nyata dalam penjaminan mutu pendidikan. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<sup>3</sup> menjelaskan konsep EDS sebagai proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain bahwa evaluasi diri sekolah/madrasah (EDS/M) itu kegiatan evaluasi yang (1)berdasarkan SPM dan SNP (2)dilakukan oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala sekolah/ madrasah, (3)terhadap mutu pendidikannya sendiri, (4)untuk menemukan akar permasalahan yang dihadapi, dan (5)untuk membuat rekomendasi dan langkah nyata perbaikan mutu pendidikannya sendiri pada waktu yang akan datang dalam bentuk RKS/M.

---

<sup>2</sup> Hendarwan, *Kendala-Kendala Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 20, Nomor 1, Maret 2014, hal.74-86

<sup>3</sup> Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Evaluasi Diri Sekolah*, Tahun 2015, hal. 3. SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. SNP (Standar Nasional Pendidikan) adalah criteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Sedangkan RKS (Rencana Kerja Sekolah) adalah acuan pengembangan program sekolah di masa yang akan datang yang dihasilkan melalui proses yang sistematis yang berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau atas dasar perdiski terhadap kemungkinan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (hal.vi)

Di atas telah disebutkan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP atau 8 SNP ini meliputi (1)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (2)standar isi/kurikulum, (3)standar proses, (4)standar penilaian, (5)standar kelulusan, (6)standar pengelolaan, (7)standar pembiayaan, dan (8)standar sarana dan prasarana<sup>4</sup>. Terkait dengan EDS/M di atas, langkah-langkah evaluasinya harus berdasarkan pada 8 SNP tersebut dan kemudian hasilnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M) dan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah (RKS/M) beserta penganggarannya.

Adapun prinsip EDS/M adalah (1)berbasis pada tujuan yang telah ditetapkan sekolah/madrasah, (2)mengacu pada kriteria keberhasilan berdasarkan SNP dan SPM, (3)berazas manfaat dimana EDS/M harus memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, dan (4)obyektif dimana kegiatan EDS dilaksanakan secara jujur dan apa adanya<sup>5</sup>.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa EDS/M ini berkaitan dengan evaluasi terhadap profil diri sekolah/madrasah yang mereka kelola. Dengan evaluasi diri inilah profil suatu sekolah/madrasah akan mengalami perbaikan dan pemutakhiran data. Bagaimanapun juga data-data mereka hampir setiap tahun pasti akan mengalami perubahan, seperti data pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, penilaian, dan lainnya. Dengan demikian EDS/M akan menyangkut juga proses perbaikan dalam perencanaan selanjutnya. Pada sisi lain, EDS/M ini juga berkait dengan upaya perbaikan mutu internal sekolah/madrasah itu, dan sekaligus penilaian eksternal atas mutu pendidikannya. EDS/M secara internal merupakan upaya perbaikan bersama, dan secara eksternal merupakan upaya kesiapan diri mendapatkan penilaian dari masyarakat, pengguna (users), dan juga asesor akreditasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa EDS/M itu secara umum bertujuan untuk (1)menyusun secara profesional profil sekolah/madrasah dengan data-data yang mutakhir, (2)menyusun perencanaan dan perbaikan diri secara berkelanjutan, (3)menjamin mutu internal sekolah/madrasah, (4)memberikan

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

<sup>5</sup> Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, ..., 2015, hal.4

informasi kepada masyarakat dan pengguna (users) sekolah/madrasah itu, dan (5)mempersiapkan diri untuk akreditasi, yang kesemuanya terkait dengan 8 SNP dan SPM. Dengan kegiatan EDS/M ini setidaknya sebuah sekolah/madrasah akan mempertegas dan memperjelas mutu dan kinerja penyelenggaraan pendidikannya.

EDS/M tentunya memberikan banyak manfaat, baik bagi internal sekolah/madrasah maupun eksternal masyarakat, stakeholders, dan intansi atasannya. Dengan kata lain, arti penting penyelenggaraan EDS/M adalah:

1. Secara internal
  - a. membantu identifikasi masalah di dalam sekolah/madrasah,
  - b. membantu penilaian pelaksanaan program kegiatan,
  - c. membantu penilaian pencapaian sasaran program kegiatan,
  - d. memperkuat tradisi evaluasi diri bagi kemajuan sekolah/madrasah,
  - e. memperkuat kerjasama antarkomponen dalam sekolah/madrasah,
  - f. menyelaraskan tujuan sekolah/madrasah dengan tujuan perorangan dalam sekolah/madrasah,
  - g. mempermudah proses kaderisasi kelembagaan, dan
  - h. membantu menyusun prioritas kerja peningkatan mutu sekolah/madrasah.
2. Secara eksternal
  - a. menyelaraskan program sekolah/madrasah dengan SPM dan SNP,
  - b. menyelaraskan harapan sekolah/madrasah dengan harapan masyarakat dan pengguna (users),
  - c. memberikan informasi aktual tentang sekolah/madrasah kepada pihak di luar sekolah/madrasah,
  - d. mempermudah proses kerjasama antara sekolah/madrasah dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kapasitas sekolah/madrasah tersebut, dan
  - e. memperlancar proses akreditasi oleh asesor.

## **Perencanaan Kerja Pendidikan**

Dalam proses manajemen, perencanaan (planning) merupakan kegiatan strategis. Dalam manajemen pendidikan di sekolah/madrasah, perencanaan sekolah/madrasah pun menjadi strategis diselenggarakan untuk memberikan arah dan bimbingan bagi segenap pegiat pendidikan di dalam sekolah/madrasah tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita (visi). Dengan kata lain, perencanaan adalah aspek manajemen dari pencapaian tujuan dan cita-cita (visi); cita-cita (visi) dan tujuan sekolah/madrasah menjadi mustahil dapat diraih tanpa kegiatan perencanaan. Dengan demikian sebenarnya sebelum kegiatan perencanaan dilakukan, visi-misi dan tujuan sekolah/madrasah harus dibuat; apa visi-misi dan tujuan penyelenggaraan sekolah/madrasah itu? Adapun visi-misi dan tujuan itu terlahir dari proses evaluasi diri secara terus-menerus yang kemudian membentuk nilai-nilai khas, yang mengerucut dan mengkristal menjadi cita-cita luhurnya.

Perencanaan kerja pendidikan di sekolah/madrasah mewujudkan dalam bentuk proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah ke depan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk menjamin pencapaian cita-cita (visi) dan tujuan sekolah/madrasah dapat dilaksanakan dengan jelas, terukur, pasti, dan minim resiko. Dalam prakteknya, perencanaan kerja pendidikan ini berupa proses penyusunan rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M).

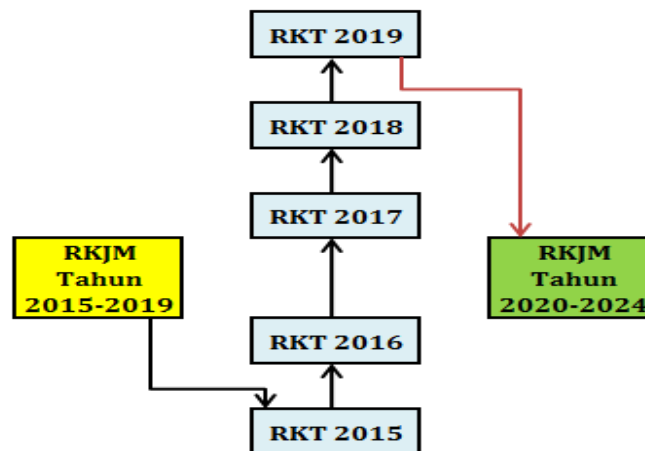
RKS/M pada prinsipnya diselenggarakan untuk: (1)memperbaiki hasil pendidikan dari hasil sebelumnya, (2)berbasis data, (3)membawa perubahan, (4)berbasis hasil evaluasi, (5)memperhatikan dorongan kebutuhan (demand driven), (6)menyeluruh dan terpadu dengan perencanaan pemerintah, (7)melibatkan multipihak (stakeholders) secara partisipatif, jujur, dan transparan, dan (8)memperhatikan prinsip manajemen yang efektif, efisien, dan produktif. RKS/M ini umumnya melalui tahapan, berupa: (1)tahap analisa lingkungan strategis kontekstual,(2)tahap analisa situasi pendidikan saat ini, (3)tahap perumusan pendidikan yang diharapkan kedepan, (4)tahap analisa kesenjangan (antara tahap 2 dan 3), (5)tahap perencanaan strategis 5 tahun dan operasional 1

tahunan (berdasarkan hasil tahap 4), (6)tahap pelaksanaan, dan (7)tahap pengawasan dan evaluasi. Adapun susunan RKS/M pada umumnya berupa:

1. Pendahuluan, yang memuat uraian umum dunia pendidikan,
2. Analisa lingkungan strategis, yang memuat uraian kontekstual.
3. Analisa situasi pendidikan terkait pemerataan, mutu, efisiensi, relevansi, dan kapasitas,
  - a. uraian situasi pendidikan saat ini senyatanya,
  - b. uraian situasi pendidikan yang diharapkan, dan
  - c. uraian kesenjangan antara kenyataan dan harapan,
4. Rencana strategis 5 tahun dan operasional 1 tahunan;
  - a. rencana strategis 5 tahun memuat visi, misi, tujuan, program strategis 5 tahun, strategi pelaksanaannya, rencana biaya, rencana pelaksanaan program strategis, gambaran hasil (milestone), dan rencana monitoring dan evaluasi (monev),
  - b. rencana operasional 1 tahunan memuat sasaran dan tujuan jangka pendek tahunan yang akan dicapai, program untuk mencapai tiap sasaran, rencana alokasi biaya/dana, rencana pelaksanaan program, jadwal pelaksanaan program, hasil (milestone), rencana monev, dan penanggungjawab program/kegiatan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebuah sekolah/madrasah umumnya memiliki apa yang dikenal sebagai Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M), yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang berlaku 5 tahunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berlaku 1 tahun pembelajaran, dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M). RKT dan RKAS/M (1 tahunan) merupakan penjabaran dari RKJM (5 tahunan). Dengan kata lain, pelaksanaan dan evaluasi terhadap RKT dan RKAS/M itu dapat menjadi bahan manajemen penyusunan RKJM 5 tahun berikutnya. Secara siklik Gambar 1 berikut dapat mempermudah pemahamannya.





Gambar 1. Skema Siklus RKJM dan RKS di Sekolah/Madrasah

Gambar 1 di atas menunjukkan skema perencanaan kerja pendidikan yang umum diselenggarakan di sekolah/madrasah. Perencanaan kerja pendidikan adalah penyusunan rencana-rencana kerja terkait dengan pembuatan RKS/M yang berupa RKJM dan RKT. Dari gambar di atas dapat dijelaskan tentang proses perencanaan kerja pendidikan, bahwa dokumen RKJM Tahun 2015-2019 di sebuah sekolah/madrasah sebenarnya merupakan hasil evaluasi diri dan perencanaan kerja pendidikan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dokumen RKJM Tahun 2015-2019 itu dijabarkan secara berkesinambungan menjadi dokumen tahunan RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017, RKT 2018, dan RKT 2019. Kesenambungan antar tahun ini tetap diselenggarakan proses kegiatan evaluasi diri dan perbaikan atas perencanaan kerja pendidikan. Kemudian dari evaluasi diri dan perbaikan atas perencanaan kerja pendidikan tahun-tahun sebelumnya ini disusunlah RKJM Tahun 2020-2024 di sekolah/madrasah tersebut.

### Hubungan Evaluasi Diri dan Perencanaan Kerja Pendidikan

Hubungan antara EDS/M dengan perencanaan kerja pendidikan secara praktis merupakan hubungan antara EDS/M dengan RKS/M. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (2015) telah membuat alur

penyusunan RKS/M seperti pada Gambar 2<sup>6</sup>. Dari gambar ini, posisi EDS/M berkaitan dengan profil mutu sekolah/madrasah, bersamaan dengan peninjauan terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah, serta dengan SNP dan SPM.



Gambar 2. Alur Penyusunan RKS

Menurut Ahmad Calam dan Amnah Qurniati<sup>7</sup>, yang dimaksud dengan *visi* adalah gambaran ideal tentang masa depan (future) yang realistis dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu; adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan *misi* adalah pernyataan dari visi mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa mendatang, yang memberikan produk pelayanan kepada publik, yang berperan untuk mengenalkan para anggota organisasi terhadap peran dan fungsinya. Adapun *tujuan* adalah penjabaran dari pernyataan misi, oleh karena itu tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada prakteknya, visi, misi, dan tujuan ini dirumuskan juga oleh pemerintah

<sup>6</sup> Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, ..., 2015, hal.20

<sup>7</sup> Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*, dalam *Jurnal Saintikom*, volume 15, nomor 1, Januari 2016, hal.53-68

pusat dan daerah<sup>8</sup>, dan kemudian dijadikan acuan oleh sekolah/madrasah di daerah masing-masing. Visi, misi, dan tujuan ini berada dalam satu kesatuan susunan RKS/M.

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan (Pasal 1), yang merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target pendidikan (Pasal 6)<sup>9</sup>. Sedangkan SNP atau lazim disebut 8 SNP meliputi (1)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (2)standar isi/kurikulum, (3)standar proses, (4)standar penilaian, (5)standar kelulusan, (6)standar pengelolaan, (7)standar pembiayaan, dan (8)standar sarana dan prasarana.

EDS/M akan melihat hubungan antara data 8 SNP sebagai kenyataan profil sekolah/madrasah dengan SPM sebagai tolak ukur. Hubungan 8 SNP dengan SPM itu dapat berujud  $8 \text{ SNP} > \text{SPM}$  atau  $8 \text{ SNP} < \text{SPM}$ .

1.  $8 \text{ SNP} > \text{SPM}$ . Ini berarti bahwa realitas data mutakhir profil sekolah/madrasah melebihi *di atas* standar yang ditetapkan pemerintah. Dapat dikatakan di sini bahwa sekolah/madrasah itu memiliki profil mutu (+). Semakin banyak data yang melebihi di atas standar, semakin tinggi mutu sekolah/madrasah itu.
2.  $8 \text{ SNP} < \text{SPM}$ . Ini berarti bahwa realitas data mutakhir profil sekolah/madrasah berada *di bawah* standar yang ditetapkan pemerintah. Dapat dikatakan di sini bahwa sekolah/madrasah itu memiliki profil mutu (-).Semakin banyak data yang berada di bawah standar, semakin rendah mutu sekolah/madrasah itu.

EDS/M dengan membandingkan 8 SNP dengan SPM di atas akan menentukan bagaimana profil mutu sekolah/madrasah itu. Adapun proses penggalian data untuk memperbandingkan ini biasanya mempergunakan lembaran dan tabulasi kuesioner yang memerlukan jawaban berdasarkan data

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

mutakhir dan fakta di lapangan. Isian dan kuesioner ini biasanya menyangkut: (1) data identitas sekolah/madrasah, (2) data pendidik dan tenaga kependidikan, (3) data kurikulum dan kelengkapannya, (4) data kegiatan ekstrakurikuler, (5) data siswa, (6) data prestasi dan lulusan, (7) hasil ujian, (8) data keuangan sekolah/madrasah, (9) data sarana dan prasarana sekolah/madrasah, (10) data dokumentasi RKJM/RKS dan RKT, (11) data pengelolaan sekolah/ madrasah dan komite, dan dapat ditambah dengan (12) data hubungan masyarakat dan kondisi lingkungan dan (13) data kesejarahan sekolah/madrasah. Di sinilah kejujuran dan transparansi kita menjadi kunci utama kesuksesan proses EDS/M terhadap sekolah/madrasah yang kita kelola.

Hasil dari EDS/M, baik yang lebih (+) maupun yang kurang (-) pada setiap item pengisian kuesioner itu dapat mewakili gambaran kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dari sekolah/madrasah itu. Artinya, bahwa penyelenggaraan EDS/M itu dapat menyertakan analisa SWOT di dalamnya sebelum hasil ESD/M dinarasikan dalam bentuk sejumlah rekomendasi dan penyusunan skala prioritas perbaikan dan pengembangan sekolah/madrasah untuk selanjutnya membuat RKS/M.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara EDS/M dengan penyusunan kerja pendidikan berupa RKS/M itu sangat erat. Kegagalan dalam penyelenggaraan EDS/M dapat menyebabkan kegagalan dalam penyusunan RKS/M dan mengakibatkan kegagalan dalam perbaikan dan pengembangan sekolah/madrasah. Sebaliknya, kesuksesan dalam penyelenggaraan EDS/M dapat menyebabkan suksesnya penyusunan RKS/M dan pada gilirannya perbaikan dan pengembangan sekolah/madrasah pun dapat berlangsung sukses.

Pada Gambar 2 di atas diketahui bahwa keberadaan RKS/M berhubungan dengan dua hal penting, yaitu, (1) proses persetujuan dan pengesahan RKS/M itu bersama Komite Sekolah/Madrasah dan atasan lainnya, dan (2) proses sosialisasi bersama pemangku kepentingan seperti dunia usaha dan industri (DU/DI), mitra sekolah, dan lainnya. Kesuksesan penyusunan RKS/M yang berbasiskan EDS/M yang baik berhubungan dengan mulusnya proses persetujuan dan pengesahan RKS/M dan sekaligus proses sosialisasi. Artinya, penyelenggaraan EDS/M

sangat berpengaruh pada perencanaan kerja pendidikan yang pada gilirannya memperlancar proses peningkatan mutu sekolah/madrasah. Pendek kata, apakah di sekolah/madrasah terjadi proses peningkatan mutu atau tidak itu dapat diketahui dari apakah sekolah/madrasah itu menyelenggarakan EDS/M dan perencanaan kerja pendidikan dengan baik. Semakin baik penyelenggaraan EDS/M dan perencanaan kerja pendidikan di suatu sekolah/madrasah, maka semakin jelas upaya peningkatan mutu pendidikan di dalamnya.

### **Penutup**

Evaluasi diri sekolah/madrasah (EDS/M) sangat bermanfaat bagi internal sekolah/madrasah maupun pihak eksternal. EDS/M ini sungguh sangat penting diselenggarakan di sekolah/madrasah itu untuk mengetahui posisi profil mutu sekolah/madrasah itu sendiri. Selanjutnya dengan diketahuinya profil mutu sekolah/madrasah, maka dapat disusun rekomendasi dan dibuat skala prioritas. EDS/M ini merupakan prasyarat bagi suksesnya penyusunan perencanaan kerja pendidikan di sekolah/madrasah. Semakin baik penyelenggaraan EDS/M dan perencanaan kerja pendidikan di suatu sekolah/madrasah, maka semakin jelas pula upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah tersebut.

### **REFERENSI**

- Agus Salim Chamidi, *Membedah Identitas Santri*, dalam *Jurnal An Nahdhah*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2017.
- Agus Salim Chamidi, *Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prospek dan Tantangan Dunia Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2015
- Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*, dalam *Jurnal Saintikom*, volume 15, nomor 1, Januari 2016, hal.53-68
- Hendarwan, *Kendala-Kendala Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 20, Nomor 1, Maret 2014

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. SNP (Standar Nasional Pendidikan)
- Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Evaluasi Diri Sekolah*, Tahun 2015